

ANALISIS KEMUNCULAN GERAKAN HIJRAH DALAM PERSPEKTIF PELUANG POLITIK

Paelani Setia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
setiapaelani66@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 25-03-2023)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 25-04-2023)

Abstrak

Tulisan ini akan mendiskusikan tentang kemunculan gerakan hijrah pada masyarakat perkotaan di Indonesia. Salah satu sudut pandang yang bisa digunakan adalah teori gerakan sosial peluang politik dengan menekankan faktor keterbukaan akses politik warga negara, stabilitas politik nasional, dan adanya dukungan massa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kajian literatur. Penelitian ini memperoleh temuan bahwa perubahan politik telah menyebabkan gerakan hijrah bermunculan dan digandrungi masyarakat yang didukung dengan perkembangan internet dan media sosial. Meski demikian, beberapa gerakan hijrah yang ada justru bersikap depolitisasi (menjauhi politik) yang hanya fokus pada perbaikan-perbaikan individu. Apa yang dilakukan para pemimpin gerakan hijrah dengan berpartisipasi dalam politik, tidak diikuti dengan pengakuan secara terang-terangan keafiliasian politiknya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pemahaman tentang esensi hijrah yang dimaknai oleh masyarakat secara metafor yang menekankan pada perbaikan individu.

Kata Kunci: *gerakan pemuda hijrah, peluang struktur politik, stabilitas politik, aliansi politik.*

Abstract

This paper will discuss the emergence of the hijrah movement in urban communities in Indonesia. One of the points of view that can be used is the social movement theory of political opportunity by emphasizing the factors of openness of citizens' political access, national political stability, and mass support. This research uses qualitative methods with data collection through literature review. This research finds that political change has caused the migration movement to emerge and be loved by the community, supported by the development of the internet and social media. However, some existing migration movements are depoliticizing (away from politics), which only focus on individual improvements. The leaders of the migration movement did by participating in politics was not followed by overt recognition of their political affiliation. This is due to an understanding of the essence of hijrah, which society interprets in a metaphorical manner that emphasizes individual improvement.

Keywords: *hijrah youth movement, political opportunity structure, stabilizing politics, political alliances.*

Pendahuluan

Munculnya gerakan Hijrah di Indonesia menuai respon beragam dari masyarakat, ada yang menyambut dengan baik dan ada yang menolak (Meuleman, 2005). Respon positif datang dari mereka yang menilai gerakan hijrah sebagai eksepsionalisme (pertahanan) di tengah derasnya arus generasi muda milenial sekuler yang menjauh dari nilai-nilai agama. Ini membuktikan bahwa generasi milenial tidak monolitik atau bisa dilihat dalam satu dimensi, tetapi identik dengan hedonisme khas masyarakat urban.

Dorongan tambahan muncul dari masyarakat yang percaya pada pelestarian karakteristik kehidupan masa muda atau etos masyarakat sekitarnya (Addini, 2019). Hal ini terlihat dari pola hijrah serta karakter masing-masing kota. Di Bandung, hijrah lebih erat kaitannya dengan keberagaman kelompok hobi. Sementara itu, tren hijrah di Jakarta seringkali mengangkat isu-isu tentang egalitarianisme; di Yogyakarta, hijrah sangat membumi di masyarakat; dan di Jawa Timur hijrah dikaitkan dengan tradisionalisme (Fajriani & Sugandi, 2019).

Dengan demikian, para pendukung kampanye hijrah percaya bahwa perkembangan ini mewakili kelahiran kembali spiritual (*ghirah*) kaum muda dalam beragama. Mereka yakin solusi hijrah ini tepat untuk kehidupan milenial yang semakin bertumpu pada internet dan media sosial (Wibawa, 2019).

Di sisi lain, terdapat kewaspadaan dan penolakan oleh segmen masyarakat lainnya, terutama mereka yang menganut bentuk dan corak agama konvensional secara keseluruhan (Setiawati, 2019). Mereka menyimpulkan bahwa hijrah telah mengubah posisi lembaga atau otoritas agama Islam yang ada. Hal ini terlihat dari para da'i hijrah yang bukan dari NU atau Muhammadiyah dan dipandang kurang berwibawa di mata masyarakat. Menurut Resty Woro Yuniar, NU adalah organisasi paling pesimistis yang bertanggung jawab atas bangkitnya gerakan hijrah. Yuniar melanjutkan, NU memandang tren hijrah tidak lebih dari sekadar aktor yang ingin menghidupkan kembali peruntungannya setelah masa keemasannya berakhir (Yuniar, 2019). Majalah Tempo (baca: Setelah Artis Ramai-ramai Berhijrah, 2019) sependapat dengan laporan ini, yang menyatakan bahwa kampanye hijrah merupakan perkembangan di kalangan artis, musisi, dan tokoh masyarakat yang mengubah gaya hidup mereka ke tipe yang lebih Islami.

Catatan peringatan lainnya adalah pernyataan bahwa kampanye hijrah terkait dengan radikalisme-ekstremisme Islam menyesatkan (Irfansyah, 2020). Selain itu, ini terkait dengan sejumlah gerakan politik praktis. Jika gerakan hijrah menyebar ke kota-kota besar, mereka banyak melakukan aksi jalanan, konsolidasi komunitas, dan rekrutmen langsung. Hal ini ditunjukkan dengan konsolidasi Islam di Pilpres 2019 melalui dukungan suara untuk Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh hijrah, antara lain Abdul Somad, Adi Hidayat, dan artis Arie Untung, menyatakan terbuka mendukung calon presiden tersebut. Kehati-hatian ini juga diungkapkan oleh partai sekuler dan mendukung calon presiden Joko Widodo.

Selain itu, kehati-hatian juga diperlukan dalam konteks global. Ini merujuk pada ormas transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap sebagai "wahana" radikalisme dalam gerakan hijrah perkotaan di Indonesia. Dalam skala global, itu juga diakui oleh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang secara terbuka mengumumkan latar belakang hijrah dengan memanggil dan menyambut orang-orang untuk bergabung dengan mereka di Irak dan Suriah di bawah kepemimpinan Abdurahman Al-Baghdadi (Santuso et al., 2020). ISIS memanfaatkan esensi hijrah geografis konvensional dengan menyebut wilayah yang tidak terkendali sebagai *Darul Harb* dan wilayah yang telah ditaklukkan sebagai *Darul Islam*. Alhasil, propaganda ISIS mengatakan bahwa Muslim di

seluruh dunia harus bersatu untuk membantu pendirian negara Islam dan kontrol negara lain dengan merebut wilayah lainnya.

Namun, berbagai tingkat kehati-hatian dan penentangan terhadap maraknya hijrah diwarnai dengan prasangka yang menyertainya, terutama di antara mereka yang menjadi dalang (Setiawati, 2019). Misalnya, lembaga Islam arus utama yang kompetitif dan takut akan pergerakan hijrah meningkatkan kesadaran akan otoritas da'i hijrah. Apalagi melihat keaslian para pendukung kampanye hijrah yang dilandasi popularitas media sosial dan tidak lagi pada sistem hierarki otoritas (tradisional) (Yuniar, 2019). Kampanye hijrah, yang diasosiasikan dengan gerakan populis Islam, seringkali diwarnai dengan bias generalisasi. Gerakan hijrah bersifat pluralistik, tergantung dari karakter yang dimilikinya, dan beberapa diantaranya apolitis atau tidak terpengaruh dengan politik praktis. Halnya seperti yang dilakukan oleh Salafi yang bahkan sepenuhnya melarang politik elektoral. Terakhir, kehati-hatian gerakan hijrah dan ISIS sama-sama melibatkan beberapa prasangka yang bias. Ini mengabaikan bagaimana gerakan hijrah Indonesia yang menggunakan kata "hijrah" secara metaforis, berbeda dengan ISIS yang seringkali Islamofobia.

Tulisan ini akan mengkaji tentang kemunculan gerakan-gerakan hijrah pada masyarakat urban dengan menggunakan sudut pandang teori gerakan sosial peluang politik. Tulisan ini akan membahas apa saja faktor yang menyebabkan kemunculan gerakan-gerakan hijrah pada masyarakat perkotaan di Indonesia yang kemudian berkaitan dengan fenomena-fenomena politik yang ada di Indonesia.

Sejauh ini tulisan-tulisan mengenai gerakan-gerakan hijrah selalu berkulat pada penyesuaian identitas kelompok dan penggunaan media digital dalam aktivitas gerakannya. Zahara, dkk (2020), menyebut bahwa gerakan hijrah menjadi gerakan sosial keagamaan karena menciptakan identitas kelompok tersendiri dan berusaha menjaga identitasnya tersebut. Sama halnya dengan Fitri dan Jayanti (2020), yang menyebut gerakan hijrah merupakan kelompok eksklusifisme modern karena diisi oleh artis-artis terkenal. Bahkan, para artis yang terlibat berinovasi agar tetap mempertahankan panggungnya. Selanjutnya, Fajriani dan Sugandi (2019), memfokuskan pada sudut pandang orientasi identitas terhadap gerakan-gerakan hijrah dan berkesimpulan bahwa gerakan-gerakan hijrah mempunyai efek positif bagi penguatan identitas umat Islam di Indonesia.

Sementara penelitian mengenai gerakan hijrah dalam sudut pandang penggunaan media baru dalam kemunculan gerakan hijrah ada benarnya juga karena salah satu faktor kemunculan dan menguatnya gerakan ini adalah internet dan media sosial. Tulisan Meiranti (2019) misalnya, menjelaskan bahwa fenomena hijrah begitu banyak digandrungi karena merupakan tren yang menyebar dari media sosial sehingga banyak diikuti kalangan milenial. Hal ini berkaitan dengan sifat milenial yang tidak dapat dipisahkan dari media sosial. Kemudian tulisan Abdurrahman (2020), yang menyebut bahwa ketertarikan generasi muda terhadap agama dipengaruhi oleh media baru yakni media sosial. Media baru tersebut mempengaruhi minat pemuda dalam mempelajari agama Islam.

Penulis sepenuhnya setuju dengan apa yang diungkap penulis sebelumnya, hal ini terutama berkaitan dengan kelahiran internet dan berdampak pada kehidupan beragama. Namun, tulisan ini mencoba mengungkap kemunculan gerakan-gerakan hijrah di Indonesia dari sudut pandang peluang politik. Tulisan ini akan menguraikan hal-hal mendasar dalam menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kelahiran gerakan hijrah. Terutama bagaimana gerakan-gerakan hijrah muncul dan eksis hingga saat ini dalam konteks kehidupan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data melalui kajian literature (*library research*) (Snyder, 2019). Karena sumber data yang digunakan adalah seutuhnya berasal dari kepustakaan atau dokumentatif, dengan mengkaji sumber data yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tema hijrah, gerakan sosial, dan teori peluang politik. Selanjutnya pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu model penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan fenomena hijrah sehingga memberi gambaran kepada masyarakat tentang perilaku hijrah kaum urban di perkotaan.

Pembahasan

Makna Hijrah Sebagai Kiasan

Hijrah adalah konsep sentral dalam kehidupan umat Islam. Salah satu indikasinya adalah penggunaan kalender Hijriah baik sebagai kalender utama maupun kalender nasional. Hijrah seringkali mengacu pada kisah Nabi Muhammad SAW pada era Makiyah dan Madaniyah, yang mengakibatkan pembagian ayat-ayat Alquran menurut wahyu dari dua periode tersebut. Dengan demikian, hijrah adalah pengalaman sekali seumur hidup yang tidak dapat ditiru atau ditandingi, termasuk oleh umat Islam saat ini (Casewit, 1998).

Selain itu, sentralitas hijrah menghasilkan konsep yang padat dan sarat makna. Daod Casewit (1998) membedakan dua tafsir hijrah: *pertama*, sebagai fenomena sejarah, dan *kedua*, sebagai metafora. Keduanya memiliki perbedaan penting; hijrah secara sejarah (tradisional) diakhiri dengan penanglukan Mekah (*Fathul Mekkah*), sedangkan hijrah sebagai metafora (simbol) tetap belum selesai, bisa diperdebatkan, dan tunduk pada interpretasi. Transparansi makna hijrah metafora terlihat dari banyaknya kampanye yang menggunakan hijrah secara sepihak. Misalnya, dalam pengertian global, Baghdadi telah menggunakan hijrah dalam hubungannya dengan *Daulah Islamiyah* dan propaganda dunia Muslim untuk merekrut umat Islam untuk memasuki apa yang dia sebut sebagai *kekhilafahan Islam*, alias ISIS (Sudiman, 2017).

Sedangkan hijrah telah dimaknai sebagai pertobatan individu dalam masyarakat kontemporer, khususnya di kalangan anak muda dan milenial beberapa tahun terakhir (Hidayat et al., 2021). Gerakan Pemuda Hijrah (*Shift*) Bandung merupakan salah satu pemimpin gerakan hijrah Indonesia dan telah menjadi tren masa kini (Mila Nabila Zahara & Wildan, 2020). Konsep hijrah metafora sudah mapan atau memiliki pijakan dalam Alquran dan Hadits. Dengan demikian, penggunaan istilah hijrah menumbuhkan semangat Islam, yang biasanya ditentukan oleh kampanye kolaboratif yang berbasis komunitas dan bergantung pada internet dan media sosial sebagai penunjangnya (Muntazori & Sunarto, 2019). Lambat laun, tren hijrah di kota-kota besar lainnya berkembang sebagai hasil dari gagasan hijrah diterima sebagai metafora.

Hijrah secara sejarah dimaknai dalam dua peristiwa: *Hijratul-ula* dan *Hijrat al-Nabawiyya* adalah dua divisi sejarah Hijrah. *Hijratul-ula* adalah perjalanan ke Habasyah tanpa Nabi Muhammad yang dianggap sebagai pelarian singkat dan berlindung di bawah Raja Kristen Najasyi. Baru kemudian *Hijra al-Nabawiyya* yakni berhijrah secara permanen ke Madinah, sebagaimana yang dibutuhkan pada saat itu bagi seluruh umat Islam yang berada di Mekah (Casewit, 1998). Dorongan untuk hijrah ini adalah ketakutan akan penganiayaan terhadap orang Mekah saat itu. Dalil Al-Quran sebagai pijakan hijrah ini adalah surat An-Nisa ayat 100 yang artinya:

“Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada

Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Saat itu, hijrah diterjemahkan sebagai tanggung jawab kolektif umat Islam. Akibatnya, siapa pun yang berhijrah dan meninggal dalam keadaan itu langsung menerima Surga (*syahid*). Demikian pula sebaliknya, siapa pun yang meninggal dalam kondisi tidak berhijrah akan binasa di Neraka (Casewit, 1998). Sebagaimana tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 97, yang artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?'. Mereka menjawab: 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)'. Para malaikat berkata: 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?'. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat Kembali".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hijrah secara sejarah merupakan pola pikir kolektif Muslim. Artinya, hijrah itu wajib dalam pengertian ini untuk semua warga negara yang bersatu dan kuat, bukan untuk pribadi. Selain itu, hijrah historis ini dipandang sebagai kebijakan diplomatik Nabi Muhammad Saw dalam mempersatukan umat Islam. Perpindahan dari Mekah ke Madinah ini dianggap sebagai awal perjuangan umat Islam untuk akhirnya menaklukkan Kota Mekah (*Fathul Mekkah*).

Setelah penaklukan Mekah, umat Islam tidak lagi diharuskan untuk berhijrah, seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Namun, pelajaran yang didapat dari peristiwa penting ini tidak dapat diabaikan. Itu juga harus terwujud dengan cara yang paling erat kaitan dengannya, yaitu Jihad (Darajat, 2016). Sebagaimana Hadis Nabi Saw yang dibukukan Ahmad bin Hanbal, diceritakan Nabi Muhammad ketika ditanya: *"Laku iman apa yang paling baik?"*, Nabi menjawab, *"Hijrah"*. Lalu ketika ditanya *"Hijrah macam apa yang paling baik?"*, Nabi menjawab, *"Jihad"*. Namun makna jihad yang dimaksud luas dan tidak bisa dipandang sempit sebagai perang. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam Musnad Ahmad, Sunan at-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan Sahih Ibn Hibban, *"Jihad yang paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah"*. Dalam hadist lain yang diriwayatkan Tirmidzi menyebut: *"Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang baik yang mengena untuk pemimpin yang zalim"* (Darajat, 2016).

Berbeda dengan pengertian hijrah saat ini sebagai metafora. Gerakan hijrah saat ini lebih mementingkan niat dan perilaku, dengan perilaku yang positif, dan dengan jalan menuju moralitas dan spiritualitas. Hadits yang sering dikutip adalah sebagai berikut: *"Hijrah belum berakhir sehingga berakhirnya taubat, dan taubat tidak akan berakhir sehingga matahari terbit dari sebelah barat"* (Irfansyah, 2021). Inilah salah satu alasan hijrah digunakan sebagai simbol pertobatan pribadi. Dengan demikian, kata "pertobatan" sering digunakan secara bergantian dengan hijrah dalam kasus ini, dalam arti tidak melakukan satu perilaku buruk demi perilaku yang lebih baik. Jika sebagai bagian dari hijrah historis, orang-orang meninggalkan Mekah untuk bergabung dengan Nabi Muhammad Saw di Madinah, maka dalam taubat, mereka melepaskan perilaku yang dilarang Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perbedaan lainnya adalah, sementara hijrah historis adalah tindakan bersama dari semua Muslim, hijrah metaforis adalah pertaubatan yang diserukan kepada Muslim sebagai individu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa protes hijrah saat ini mengacu pada hijrah metaforis. Seruan para penceramah gerakan hijrah di media sosial merefleksikan hal tersebut, yaitu perbaikan diri atau taubat pada level individu. Namun, pengertian hijrah masih menjadi tema dalam kehidupan anak muda lainnya yang tidak hanya mementingkan taubat. Terkadang, hijrah ini dikaitkan dengan pekerjaan, bisnis, perijodohan, atau masalah lainnya. Misalnya, Hanan Ataki menggunakan

hijrah sebagai metafora kontemporer dengan menyamakan pergeseran status belum menikah (lajang) dengan pernikahan sebagai hijrah (Fitriani, 2018). Terkadang untuk memperkuat kiasan tersebut digunakan ayat-ayat Al-Qur'an semisal mengutip An-Nisa ayat 97: "*Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?*". Namun, penting untuk mempertimbangkan konteksnya; ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk mengingatkan seseorang yang belum menikah; ayat tersebut awalnya dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi umat Islam yang mengucilkan diri dari umat dan tidak hijrah ke Madinah selama peristiwa hijrah *Hijra al-Nabawiyya*.

Landasan Empiris dan Teoritis Teori Peluang Politik

Terdapat dua peristiwa penting yang melatarbelakangi lahirnya teori gerakan sosial peluang politik. *Pertama*, gerakan hak sipil di AS tahun 1955-1968. Gerakan tersebut merupakan perjuangan kelas kulit hitam Afrika-Amerika atas hak-haknya sebagai warga negara karena terjadinya diskriminasi. Gerakan ini ditandai dengan kampanye besar-besaran perlawanan sipil melalui aksi-aksi protes anti kekerasan dan pembangkangan sipil sehingga menyebabkan terjadinya krisis antara aktivis dan pemerintahan. Gerakan ini menghasilkan Undang-Undang Hak Sipil pada tahun 1964 yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan asal usul bangsa dalam praktek ketenagakerjaan dan akomodasi publik. Selain itu, Undang-Undang Hak Sipil memberikan suara penuh dalam pemilu serta Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan 1965 membuka pintu bagi imigran-imigran bangsa lain non Eropa untuk masuk ke Amerika Serikat (McAdam, 2010).

Kedua, dalam sejarah pernah terjadi kekerasan kolektif di negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Italia. Peristiwa kekerasan ini melingkupi sejarah kelam bangsa-bangsa dalam Perang Dunia 1 dan Perang Dunia II yang telah mengorbankan banyak manusia (Bakunin, 1990). Kekerasan tersebut melahirkan makna bahwa kekerasan kolektif seperti yg terjadi di Perancis, Jerman, Italia dan negara Eropa lainnya tidak tergantung pada struktur transformasi masyarakat melainkan pada perebutan kekuasaan politik (Tarrow, 2013).

Selain latar belakang historis, kemunculan teori gerakan sosial peluang politik juga dilatari oleh latar belakang teoritis. Sama halnya dengan teori-teori ilmu sosial lainnya yang biasanya mengoreksi atau memperbaharui teori sebelumnya. Teori peluang politik memfokuskan pada faktor-faktor politik yang tidak dijelaskan oleh teoritikus sebelumnya. Faktor politik yang dimaksud adalah negara, institusi politik, aktor politik, dan partai politik (Buechler, 2016). Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang hanya berfokus pada faktor-faktor motivasi psikologis atau sosiologis.

Teori kesenjangan relatif merupakan teori yang fokus pada faktor psikologis aktor karena adanya kekecewaan terhadap tatanan kehidupan yang ada (Locher, 2002). Dalam teori ini, aktor-aktor atau individu memiliki kesamaan perasaan pada adanya kesenjangan (gap) dalam kehidupan, dimana biasanya ada kelompok yang mapan dan kelompok yang dirugikan. Misalnya, kelompok masyarakat kaya dan miskin yang menyebabkan kelompok masyarakat miskin melebur dan mendirikan gerakan sosial akibat kekecewaan tersebut.

Sementara teori mobilisasi sumber daya merupakan unsur teori sosiologis (Stolley, 2005). Teori sumber daya merupakan fokus teori yang dilatari oleh teori kesenjangan relatif dengan menekankan pada gerakan sosial yang tidak hanya disebabkan oleh adanya faktor psikologi berupa kekecewaan melainkan ada atau tidaknya sumber daya. Sumber daya sendiri merupakan unsur-unsur pendukung bagaimana sebuah gerakan sosial terlahir. Sumber daya material seperti gedung, uang, dan bentuk fisiklainnya akan ditopang sumber daya non-material seperti kerjasama, kepercayaan, jaringan, pertemanan, dan sebagainya. Kedua sumber daya ini akan membentuk gerakan sosial karena ada unsur

sosiologis yakni proses sosial, interaksi, dan pembentukan organisasi. Ketika sudah berwujud maka terlahirlah sebuah gerakan sosial.

Teori lain yang bentuk penekanannya pada faktor sosiologis adalah teori kesamaan identitas (Pichardo, 1988). Teori kesamaan identitas merupakan koreksi teori mobilisasi sumber daya dimana teori ini menjelaskan bahwa mobilisasi sumber daya saja tidak cukup dalam membentuk gerakan sosial, melainkan diperlukan adanya solidaritas kuat diantara aktor yang terlibat. Mobilisasi sumber daya dianggap terlalu materialistik karena sang aktor bisa saja tidak benar-benar sepenuh hati terlibat dalam gerakan sosial atau hanya memanfaatkan keuntungan sumber daya saja. Padahal sejatinya gerakan sosial harus dimaknai secara mendalam dan harus berlanjut tatkala sumber daya sudah menipis. Teori kesamaan identitas menekankan pada tiga faktor kunci (Pichardo, 1988): *pertama*, identitas melingkupi kesamaan tujuan; *kedua*, identitas mengacu pada jaringan dan relasi aktif antar aktor yang saling memengaruhi; dan *ketiga*, adanya kekuatan emosional yang mengikat individu sebagai bagian dari kesatuan utuh gerakan.

Teori peluang politik merupakan kritik terhap teori-teori sebelumnya. Teori ini menganggap bahwa faktor psikologis dan sosiologis tidak cukup menjelaskan kemunculan gerakan sosial. Teori peluang politik diperkenalkan oleh Peter Eisenger (1973), yang menyebut bahwa kesuksesan dan kegagalan suatu gerakan sosial dipengaruhi oleh politik, bukan motivasi psikologi dan sumber daya secara sosiologis. Eisenger (dalam Sukmana, 2016), awalnya memperkenalkan konsep teori peluang politik sebagai *Political Opportunity Structure* (POS) dan dapat diterapkan secara umum dalam menganalisis gerakan sosial pada konteks karakteristik lokal. Suatu struktur adalah spesifik, setiap lokasi berbeda dan bervariasi dari waktu ke waktu.

Teori peluang politik adalah pendekatan proses politik yang memberikan perhatian sistemik pada institusi dan politik dimana di dalamnya gerakan sosial berlangsung (Della Porta, 2006). Sementara menurut McAdam (1996), teori peluang politik menekankan pada perluasan kesempatan politik sebagai dasar utama dalam terjadinya kolektif. Lebih lanjut, Tilly memberikan definisi teori peluang politik secara lebih konseptual:

"Sustained series of interactions between power holders and persons successfully claiming to speak on behalf of a constituency lacking formal representation, in the course of which those persons make publicly visible demands for changes in the distribution or exercise of power, and back those demands with public demonstrations of support" (Tilly, 1979).

Dalam artian teori peluang politik memungkinkan interaksi berkelanjutan antara pemegang kekuasaan dengan orang-orang (aktor) dengan mengklaim berbicara atas nama konstituen tertentu diluar perwakilan formal, dimana orang-orang tersebut membuat tuntutan yang terlihat secara publik dengan tujuan perubahan dalam distribusi atau pelaksanaan kekuasaan, serta mendukung tuntutan dengan demonstrasi yang di dukung publik (Tilly, 1979). Dengan demikian, ada dua elemen penting yakni aktor gerakan dan pemerintah dalam konsep teori peluang politik tersebut. Aktor gerakan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya kepada pemerintah melalui aksi-aksi demonstrasi agar diakomodasi oleh pihak pemerintah.

Sementara Tarrow, menjelaskan konsep teori peluang politik sebagai sebuah peluang politik yang kemudian memunculkan gerakan sosial yang bersumber pada dua faktor: *pertama*, *proximate opportunity structure*; dan *kedua*, *state centered opportunity structure*. *Proximate opportunity structure* merupakan pendekatan yang menilai bahwa peluang politik bagi lahirnya gerakan sosial karena adanya suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, bisa saja legitimasi pemerintahan yang merosot, atau bahkan legitimasi

pemerintahan yang tidak diakui lagi oleh masyarakat (*Policy specific opportunities*). Selanjutnya, *proximate opportunity structure* juga menilai bahwa peluang politik bagi gerakan sosial adalah terjadinya perubahan-perubahan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, ataupun masyarakat, baik tujuan maupun keberadaannya di masyarakat. Faktor penyebab perubahan adalah politik, ekonomi, budaya, ideologi, hingga agama (Tarrow, 2013).

Sementara, *state centered opportunity structure* dimaknai sebagai peluang politik dalam tubuh negara dan yang ada di dalamnya. *Pertama*, negara dianggap sebagai arena persaingan kelas-kelas sosial (*cross-sectional statism*). Dan *kedua*, terjadi perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu negara dan berpengaruh pada aktor-aktor gerakan sosial secara langsung (*dynamic statism*) (Tarrow, 2013 ; McAdam et al., 1996).

Kemudian, Tarrow membagi beberapa faktor kemunculan gerakan sosial dalam teori peluang politik menjadi empat: *Pertama*, terbuka atau tidaknya sistem politik; *kedua*, stabilitas politik; dan *ketiga*, ada-tidaknya aliansi elit dan dukungan politik. *Pertama*, dimensi keterbukaan sistem politik akan menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, begitupun ketertutupan sistem politik akan menjadi pemicu bagi lahirnya gerakan sosial. *Kedua*, dimensi stabilitas politik juga dapat menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial dimana dinamika politik yang cenderung kondusif menyebabkan gerakan sosial lahir dengan perjuangan pada isu-isu tertentu. *Ketiga*, dimensi adanya aliansi elit dan dukungan politik juga dapat menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu tidak adanya aliansi dengan elit akan menjadi penghambat bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi ini juga berkaitan dengan kapasitas negara dalam melakukan tekanan juga mempengaruhi terjadinya gerakan sosial. Semakin besar kapasitas negara dalam melakukan tekanan, semakin besar juga gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat (Tarrow, 2013; McAdam, 1996).

Faktor Kemunculan Gerakan Hijrah

1. Keterbukaan dan Stabilitas Politik

Perubahan tatanan masyarakat dari industri ke post industri diyakini menjadi salah satu unsur yang berperan dan mendorong terjadi perubahan zaman (Hage & Powers, 1992). Masyarakat industri adalah masyarakat yang berfokus pada persoalan perubahan tatanan ekonomi dan politik. Hal ini ditandai oleh kuatnya pengaruh aktor kelas pekerja atau kelas buruh dengan pemilik modal. Masyarakat ini ditandai di Eropa pada awal abad 18 sampai pertengahan abad ke 19. Sementara, pada masyarakat post-industri persoalan berubah pada tatanan diluar ekonomi dan politik, yakni persoalan kebudayaan, hak asasi manusia (HAM), lingkungan, dan keagamaan. Konteks ini dapat dipahami pada masyarakat Eropa mulai pertengahan abad 19 hingga sekarang.

Di Indonesia, konteks perubahan masyarakat tersebut baru terasa setelah terjadinya reformasi tahun 1998 (Prasisko, 2016). Adanya peralihan kekuasaan dari rezim otoriter ke demokrasi terbuka menandai dibukanya keran-keran perubahan masyarakat. Jika sebelumnya, kebebasan berserikat dibatasi, setelah reformasi kebebasan berserikat dibuka. Hal ini tentu dimanfaatkan dengan baik dengan kemunculan berbagai organisasi atau gerakan-gerakan sosial yang fokus pada satu isu tertentu, termasuk isu agama.

Reformasi merupakan peristiwa perubahan tatanan kehidupan segala aspek di Indonesia baik kehidupan sosial, politik, ekonomi, agama dan hukum (Batlajery, 2018). Hal tersebut berkaitan dengan sistem demokratisasi yang memungkinkan partisipasi tanpa pandang bulu. Menurut Huntington dan Wilson partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang kemudian mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi

biasanya bersifat individual dan kolektif, terorganisir, spontan, mantap, damai, secara kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif dan tidak efektif. Huntington dan Wilson kemudian menyebut bahwa partisipasi politik dilakukan oleh rakyat diluar birokrasi pemerintahan tetapi mempengaruhi kebijakan politik pemerintah, misalnya penyampaian pendapat, atau pemenuhan hak suara pada pemilu (Huntington & Nelson, 1976). Sementara Miriam Budiarto melihat partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam kehidupan politik, mengikuti pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan, dan kegiatan lain baik diluar maupun di dalam birokrasi pemerintahan itu sendiri (Budiarto, 2008).

Namun demikian, partisipasi politik tidak hanya soal urusan pemilu melainkan aktivitas lain yang intinya memberikan kebebasan warga negara dan menjamin warga negara dalam setiap aktivitasnya. Hal ini kemudian disebut sebagai keterbukaan akses politik. Partisipasi politik disebabkan oleh adanya akses politik terhadap pemerintahan dan birokrasi. Sistem demokrasi menyebabkan terbukanya akses politik bagi siapapun tanpa memandang suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Keterbukaan akses politik juga menimbulkan kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi bagi hak asasi setiap orang secara konstitusional yang dimuat dalam Pasal 28E ayat (3) j.o. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (Handayani, 2009).

Dalam konteks lahirnya gerakan sosial adanya keterbukaan akses politik menyebabkan kemunculannya terjadi. Termasuk pada gerakan sosial keagamaan di Indonesia. Beberapa gerakan keagamaan yang lahir seiring terbukanya akses politik misalnya Front Pembela Islam (FPI), Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara), dan JIL (Jaringan Islam Liberal) (Ahdar, 2017). Gerakan-gerakan tersebut akhirnya disusul oleh gerakan-gerakan hijrah yang dimulai pada tahun 2015 hingga sekarang (Fitriani, 2018).

Sebenarnya, gerakan hijrah memang berakar sejak menguatnya gerakan-gerakan yang bersifat transnasional dan berkembang pada tahun 1980-an semisal Hizbut tahrir Indonesia (HTI), gerakan Salafi, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Jemaah Tabligh, Tareqat dan lain sebagainya (Abidin, 2015). Fenomena gerakan-gerakan tersebut dibawa oleh para pelajar yang pulang dari negeri timur tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Gerakan-gerakan transnasional tersebut mulanya merupakan respons atas instabilitas politik di masing-masing negara, misalnya Ikhwanul Muslimin merupakan respons konflik pemerintahan di Mesir, HTI merespons ketidakstabilan pemerintahan di Palestina, dan Wahabi merespons ketidakstabilan di Arab Saudi. Belakangan, gerakan-gerakan tersebut bertransformasi ke dalam hal-hal individual dengan tujuan agar tidak kehilangan pengikutnya, termasuk dalam urusan-urusan hijrah personal (Setia, 2020).

Menurut Yuswohady (2017), pandangan untuk berhijrah sebenarnya sudah lama didakwahkan di Indonesia, dengan mengedepankan aspek-aspek tentang mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal tersebut bermula pada adanya pikiran tentang adanya degradasi moral bangsa yang banyak disorot para cendekiawan kala itu. Terutama kriminalitas, pergaulan bebas, serta mulai naiknya penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang yang dianggap perlu dibenahi agar permasalahan sosial tersebut mampu diatasi oleh gerakan-gerakan kembali pada Islam seperti yang dinarasikan oleh gerakan Islam tersebut.

Hal ini kemudian membesar seiring stabilitas politik nasional. Stabilitas politik bermakna pada bagaimana keadaan politik nasional stabil, tidak terjadi pergolakan, dan tidak dalam keadaan darurat politik. Menurut Lipset (1963), stabilitas politik terdapat empat kunci, yakni: *Pertama*, hadirnya kepemimpinan nasional yang kuat dan tegas; *kedua*, hadirnya media massa sebagai pengawas dan

berimbang; *ketiga*, masyarakat sipil yang ‘agresif’ dan progresif; dan *keempat*, hadirnya kelas menengah yang mengawasi negara di era modern.

Jika melihat gerakan hijrah yang berkembang saat ini, merupakan gerakan-gerakan sosial yang lahir dan tumbuh dari adanya stabilitas politik tersebut, maka: *Pertama*, kepemimpinan nasional di Indonesia tetap ada, apalagi seiring dimulainya pemilu langsung maka kepemimpinan berganti secara berkala dan bukan kepemimpinan secara otoriter. *Kedua*, hadirnya media massa dan media baru yakni internet dan media sosial juga membantu kelahiran gerakan-gerakan hijrah di Indonesia. Melalui media massa dan media sosial tersebut gerakan-gerakan hijrah di Indonesia populer bagi banyak masyarakat. *Ketiga*, gerakan-gerakan hijrah memang merupakan kumpulan masyarakat sipil dan progresif, apalagi bagi para pendakwah gerakan sosial yang merupakan kaum terpelajar. Mereka membawa narasi-narasi perubahan baru yang diterima masyarakat dan pengikutnya secara luas. Dan *keempat*, gerakan-gerakan hijrah juga diisi oleh masyarakat kelas menengah yang identik ada dalam masyarakat perkotaan, khususnya kelas muslim menengah (Jati, 2015). Selain itu, kelas sosial ini merupakan bagian dari generasi Y atau Z (milenial) yang sudah menyadari pentingnya progresivitas berwarga negara, memahami media baru, dan terpelajar (Shahreza, 2017).

Gerakan Pemuda Hijrah (*Shift*) di Kota Bandung misalnya, merupakan salah satu gerakan hijrah yang menjadi pelopor di Indonesia. Secara keterbukaan akses politik, partisipasi politik, dan stabilitas politik gerakan ini lahir dan dibantu oleh faktor-faktor tersebut. *Shift* diinisiasi oleh Fani Krismandar (Inong) sebagai pemimpin komunitas hobi *skateboard*, yang kemudian lebih populer dibawah arahan Hanan Ataki (Abdurrahman, 2020). Meski tidak secara langsung gerakan ini berkaitan dengan akses politik secara elektoral, namun kebebasan berserikat dimanfaatkan dengan baik dengan mendirikan gerakan hijrah ini.

Shift diisi oleh kalangan milenial progresif yang isinya kaum menengah muslim perkotaan. Narasi perbaikan akhlak dan perilaku digunakan untuk memaknai gerakan tersebut. Mereka juga diisi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa dari penjuru Kota Bandung yang ingin belajar agama dan sekaligus mengimplementasikannya dalam kehidupan. Unsur lain yang sangat penting juga adalah penggunaan media baru seperti Instagram dan Youtube yang membuat dakwah *Shift* dikagumi dan diterima banyak orang. Diketahui Instagram Shift telah diikuti oleh 1,9 juta pengikut, ditambah pengikutnya Hanan Attaki 8 juta, atau video-video ceramah YouTube mereka banyak ditonton ratusan ribu orang, begitu pula murotal mereka yang banyak diputar di *smartphone* anak muda (Rajab, 2019). Faktor-faktor tersebut jelas merupakan bagian dari adanya pengaruh stabilitas politik dalam kemunculan *Shift* Pemuda Hijrah di Kota Bandung seperti halnya apa yang sudah dipaparkan diawal bahwa teori peluang politik mempengaruhi munculnya gerakan-gerakan sosial, termasuk keagamaan.

2. Aliansi Politik

Faktor lain yang menjadi penyebab kemunculan gerakan sosial dalam perspektif teori peluang politik adalah adanya aliansi atau dukungan politik. Gerakan-gerakan transnasional seperti HTI, Salafi, Wahabi memperoleh dukungan politik dari anggota internasional karena merupakan organisasi transnasional (Abidin, 2015). Dalam konteks nasional dukungan politik terhadap organisasi tersebut tidak ada secara formal karena merupakan organisasi yang bergerak diluar parlemen—termasuk organisasi yang seringkali disebut akar lahirnya radikalisme (Woodward et al., 2014), namun demikian organisasi-organisasi tersebut seringkali dimanfaatkan dalam kontestasi politik untuk meraup suara pemilih dalam pemilu karena basis massanya.

Dukungan atau aliansi politik terhadap gerakan hijrah tidak tampak atau bias karena mereka cenderung bersikap depolitisasi. Penggunaan hijrah sebagai metafor berimbas pada konsistensi makna hijrah yang mana menekankan pada perbaikan akhlak dan perilaku secara individual. Akibatnya, unsur-unsur lain yang bersifat kolektif seperti kegiatan politik kerap kali dianggap jauh dari fokus gerakan-gerakan hijrah tersebut. Namun, demikian tampaknya hal tersebut tidak sepenuhnya benar, beberapa pendakwah gerakan hijrah seperti Abdul Somad dan Hanan Ataki seringkali secara terang-terangan memaknai pentingnya aktivitas politik dalam pemaparan dakwahnya. Dalam beberapa kesempatan dakwahnya Abdul Somad (UAS) seringkali menyebut bahwa “Islam tidak terpisah dari politik, maka umat harus sadar akan politik Islam” yang akan membawa pada kemaslahatan (UAS Official, 2019). UAS bahkan secara terang-terangan dicalonkan oleh Presidium Alumni 212 sebagai calon wakil presiden tahun 2019, namun menolaknya. Namun demikian, UAS juga secara terang-terangan mendukung capres Prabowo Subianto pada tahun 2019 yang kemudian banyak jemaah yang merespons positif upayanya tersebut. Baru-baru ini, banyak pihak juga mendesak UAS untuk masuk dalam partai politik, namun ia bersikukuh untuk tidak bergabung dalam partai politik.

Hal yang hampir serupa terjadi juga pada Hanan Ataki sebagai pemimpin *Shift* Pemuda Hijrah Bandung. Mengutip dari laman resmi DPD PKS Kota Bandung (Fakhrullah, 2018), Ataki terang-terangan mendukung pasangan calon Sudrajat-Syaikh pada kontestasi Pilgub Jawa Barat tahun 2018. Menurut Ataki, dukungan ini merupakan “politik kemaslahatan” umat agar semakin adil dengan aktif berpartisipasi dalam politik. Meski tidak ada informasi mengenai keanggotaan Ataki sebagai bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun banyak pihak yang sepakat bahwa sistem dakwah dan kaderisasi *Shift* mengikuti pola tarbiyah sebagaimana dijalankan oleh Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Hal ini diungkap oleh Piki selaku ketua Shift Pemuda Hijrah. Ia mengatakan bahwa:

“Di Shift ada satu program yang untuk pembinaan para anggota Shift yang rutin dilakukan setiap seminggu sekali, diluar kajian rutin *Shift*. Pembinaan ini modelnya seperti *liqa*, atau kajian intensif yang dibimbing oleh satu *murabi*” (Dilawati et al., 2020).

Pengajian model tarbiyah dan PKS bahkan diamini oleh Mardani Ali Sera (Ketua DPP PKS) dalam sebuah wawancara dengan Asumsi.co (Inayah, 2018). Menurut Mardani, melalui gerakan tarbiyah, PKS secara efektif menjaring kader-kader mudanya dari berbagai kampus untuk berpolitik secara nasional. Meski tidak langsung digiring ke PKS, namun bagi Mardani rekrutmen awal diserahkan kepada tarbiyah, karena kualitasnya akan ditempa dengan baik.

Dengan demikian, afiliasi politik pada gerakan-gerakan hijrah tidak bersifat langsung terhadap gerakan secara keorganisasian melainkan bertumpu pada personal pemimpin atau pendakwahnya. Hal tersebut lumrah dalam dunia politik, dimana strategi untuk meraup suara banyak dilakukan secara praktis dengan merangkul pimpinan ormas atau gerakan tertentu (Ahnaf, 2016).

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tercipta aliansi lain diluar politik, misalnya aliansi terhadap golongan atau pemahaman tertentu. Gerakan hijrah seringkali disebut gerakan keagamaan baru yang menyandarkan pada penggunaan media baru dan menjadi lawan dari aliansi gerakan keagamaan atau institusi keagamaan tradisional. Dalam gerakannya di lapangan, gerakan-gerakan hijrah juga cenderung nyaman bergerak dengan sesama gerakan hijrah yang lainnya, dan sedikit sekali menjalin komunikasi dengan gerakan-gerakan keagamaan yang telah mapan dan besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. *Shift* misalnya, lebih sering bekerjasama dengan gerakan lain yang serumpun seperti One Ummah pimpinan Rahmat Baequni, Artis-artis Hijrah, Sahabat Hijrah, dan gerakan-gerakan hijrah lainnya.

Dengan demikian, aliansi terhadap gerakan hijrah yang serumpun membentuk sebuah poros baru gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia yang saling mendukung dan bekerjasama satu sama lain dengan sama-sama menguatkan dan mempopulerkan gerakannya. Faktanya, dalam konstelasi pilpres 2019 lalu suara mereka dalam politik satu suara yakni condong pada pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Maka meskipun tidak ada dukungan politik secara langsung, namun kecenderungan pada aliansi atas kesamaan identitas menyebabkan aliansi tersebut ada dan terbentuk.

Kesimpulan

Dari diskusi diatas, salah satu faktor kemunculan gerakan hijrah di Indonesia dilatari oleh terbukanya peluang politik. Gerakan hijrah memanfaatkan momentum stabilitas politik, keterbukaan akses politik, dan aliansi politik dalam proses kelahirannya. Namun ironisnya belum terdapat bukti yang cukup dalam menilai keterlibatan mereka secara langsung dalam kancah perpolitikan nasional. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan makna hijrah sebagai kiasan dan merujuk pada perbaikan kualitas hidup individual bukan pada makna hijrah secara historis seperti perjalanan hijrah Nabi Muhammad Saw yang menyentuh aspek-aspek kolektif. Penelitian ini merupakan langkah awal agar membuka kajian lain tentang keterlibatan gerakan-gerakan keagamaan baru di Indonesia dalam kaitannya dengan kehidupan politik nasional.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. S. (2020). Generasi Muda, Agama Islam, dan Media Baru (Studi Kualitatif Perilaku Keagamaan di Shift Gerakan Pemuda Hijrah, Kota Bandung). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 20(1), 46–63.
- Abidin, Z. (2015). Wahabisme, Transnasionalisme dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam di Indonesia. *Tasâmuh*, 12(2), 130–148.
- Addini, A. (2019). Fenomena gerakan hijrah di kalangan pemuda muslim sebagai mode sosial. *Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 109–118.
- Ahdar, A. (2017). Tinjauan Kritis dan Menyeluruh terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam Masa Kini. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10(1), 19–36.
- Ahnaf, M. I. (2016). Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi, Refolusi dan Revolusi. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 127–140.
- Bakunin, M. (1990). *Statism and anarchy*. Second Hope.
- Batlajery, A. M. L. (2018). *Dari Reformasi Kepada Transformasi*. OSF Preprints.
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Buechler, S. M. (2016). *Understanding social movements: Theories from the classical era to the present*. Routledge.
- Casewit, D. S. (1998). Hijra as history and metaphor: A survey of Qur'anic and Hadith sources. *Muslim World*, 88(2), 105–128.
- Darajat, Z. (2016). Jihad dinamis: menelusuri konsep dan praktik jihad dalam sejarah Islam. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(1), 1–25.
- Della Porta, D. (2006). *Social movements, political violence, and the state: A comparative analysis of Italy and Germany*. Cambridge University Press.
- Dilawati, R., Darmawan, D., Hernawan, W., Waluyoajati, R. R. S. R., & Darmalaksana, W. (2020). ANALISIS KEBERAGAMAAN PEMUDA HIJRAH KOMUNITAS SHIFT PERSPEKTIF EMIK-ETIK. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 54–65.
- Eisinger, P. K. (1973). The conditions of protest behavior in American cities. *The American Political*

- Science Review*, 67(1), 11–28.
- Fajriani, S. W., & Sugandi, Y. S. (2019). Hijrah Islami Milenial Berdasarkan Paradigma Berorientasi Identitas. *Sosiogloba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 76–88.
- Fakhrullah. (2018). Hanan Attaki: Ini Adalah Politik Kemaslahatan. *PKS Kota Bandung*. <http://bandung.pks.id/2018/06/hanan-attaki-ini-adalah-politik.html>
- Fitri, R. N., & Jayanti, I. R. (2020). Fenomena Seleb Hijrah: Tendensi Eksklusivisme dan Kemunculan Kelompok Sosial Baru. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 3(01), 1–17.
- Fitriani, A. (2018). *Analisis isi pesan dakwah Ustadz Hanan attaki dalam akun youtube pemuda hijrah*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Hage, J., & Powers, C. (1992). *Post-industrial lives: Roles and relationships in the 21st century*. Sage.
- Handayani, F. (2009). Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM. *Toleransi*, 1(2), 218–231.
- Hidayat, R., Sholihin, M., & Wanto, D. (2021). The Hijrah Communities and Religious Superficiality: Ideology and Religiosity of the Islamic Hijrah Communities on Social Media. *Journal of Population and Social Studies [JPSS]*, 29, 118–138.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Inayah, H. (2018). Mengupas Tuntas Pengkaderan PKS Melalui Tarbiyah: Dari Kampus ke Senayan. *Asumsi.Co*. <https://asumsi.co/post/pra-kaderisasi-pks-dimulai-dari-kampus>
- Irfansyah, A. (2020). Ketika Hijrah Bukan Sekadar Perbaikan diri, tapi Juga Aksi Kolektif. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/ketika-hijrah-bukan-sekadar-perbaikan-diri-tapi-juga-aksi-kolektif-fZPP>
- Irfansyah, A. (2021). BERDAKWAH DI ERA NEOLIBERAL: TELAAH DEPOLITISASI HIJRAH DALAM UNGGAHAN MEDIA SOSIAL PEMUDA HIJRAH. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 3(1).
- Jati, W. R. (2015). Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 139–163.
- Lipset, S. M. (1963). *Political man*.
- Locher, D. A. (2002). *Collective behavior*. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
- McAdam, D. (1996). Introduction: Opportunities, mobilizing structures, and framing processes-toward a synthetic, comparative perspective on social movements. *Comparative Perspectives on Social Movements*, 1–20.
- McAdam, D. (2010). *Political process and the development of black insurgency, 1930-1970*. University of Chicago Press.
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1996). *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings*. Cambridge University Press Cambridge.
- Meiranti, M. (2019). Fenomena Hijrah Di Era Milenial Dalam Media Sosial. *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 148–160.
- Meuleman, J. (2005). *Islam in the era of globalization: Muslim attitudes towards modernity and identity*. Routledge.
- Muntazori, A. F., & Sunarto, B. (2019). A Representation of Hijrah in Visual Da'wah Media on Instagram. *IICACS: International and Interdisciplinary Conference on Arts Creation and Studies*, 3, 174–184.
- Official, U. (2019). *Youtube-Pentingnya Umat Islam Berpolitik*.
- Pichardo, N. A. (1988). Resource mobilization: An analysis of conflicting theoretical variations. *The*

- Sociological Quarterly*, 29(1), 97–110.
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9–16.
- Rajab, D. S. L. (2019). *Resepsi Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Terhadap Dakwah Melalui Instagram Ustadz@ Hanan_Attaki*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Santoso, A. G., Rifaini, E., & Adi, D. P. (2020). STRATEGI MENGHADAPI GERAKAN ISIS DAN ANCAMAN KEAMANAN DI INDONESIA. *Journal Civics & Social Studies*, 4(1), 1–10.
- Setia, P. (2020). *Islamic-buzzer dan hoaks: Propaganda khilafah oleh eks HTI Kota Bandung di Jawa Barat*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setiawati, K. (2019). *Hijrah Baru Di Kalangan Anak Muda Antara Keshalehan Dan Gaya Hidup*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Shahreza, M. (2017). Komunikator politik berdasarkan teori generasi. *Nyimak: Journal of Communication*, 1(1), 33–48.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Stolley, K. S. (2005). *The basics of sociology*. Greenwood Publishing Group.
- Sudiman, M. S. A. S. Bin. (2017). Countering ISIS Call for Hijra (Emigration): A Review through the Lens of Maqāsid Ash-Shari‘ah. *Journal for Deradicalization*, 12, 60–84.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan teori gerakan sosial*. Intrans Publishing.
- Tarrow, S. (2013). Contentious politics. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*.
- Tempo.co. (2019). Setelah Artis Ramai-ramai Berhijrah. *Tempo.Co*.
<https://kolom.tempo.co/read/1212759/setelah-artis-ramai-ramai-berhijrah/full&view=ok%0A>
- Tilly, C. (1979). *Social movements and national politics*.
- Wibawa, A. T. (2019). Fenomena Dakwah Di Media Sosial Youtube. *Jurnal Rasi*, 1(1), 1–19.
- Woodward, M., Yahya, M., Rohmaniyah, I., Coleman, M. D. M., Lundry, C., & Amin, A. (2014). The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia. *Contemporary Islam*, 8, 153–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11562-013-0288-1>
- Yuniar, R. W. (2019). How social media inspired Indonesia’s born-again ‘hijrah’ Muslim millennials. *South China Morning Post*.
- Yuswohady, H., Irvan, F., & Farid dan Ali, H. (2017). Gen M# Generation Muslim “Islam Itu Keren.” *Bandung: Mizan Media Utama*.
- Zahara, M. N., Wildan, D., & Komariah, S. (2020). Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial di Era Digital. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(1), 58–70.
- Zahara, Mila Nabila, & Wildan, D. (2020). Identity and Cultural Framing: How to Millennial Muslims to Form an Hijrah Movement in The Digital Age? *SOSIETAS*, 10(2), 862–877.